

# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN THAILAND, INDIA, DAN JEPANG SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

## *Agricultural Development Policies in Thailand, India, and Japan with Their Implications for Indonesia*

Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161  
E-mail: fransbm\_dabukke@yahoo.com*

Naskah diterima: 15 April 2014

Direvisi: 10 Juli 2014

Disetujui terbit: 22 Oktober 2014

### ABSTRACT

Policy could be an instrument to improve agricultural competitiveness of a country. This article aims to analyze agricultural development policies in the three countries, namely Thailand, India, and Japan with their implications for Indonesia. All three countries have similarities in terms of situations and performances as well as agricultural development policies useful as lessons learned to support agricultural development of Indonesia. Thailand, India, and Japan represent ASEAN, densely populated, and developed countries, respectively. The implementations of agricultural development policies in those three countries have impacts on their increased competitiveness at both regional and international levels and in turn it could affect Indonesia. Consequently, it is necessary to anticipate and countervail the impacts through some strategies such as improving human resource quality, developing technology network, enhancing innovation and integrated knowledge, and strengthening coordination among agricultural development stakeholders. It is focused, among others, on development of agribusiness, value chain, bio-economy, and food security.

**Keywords:** *agriculture, development, policy, Thailand, India, Japan, Indonesia*

### ABSTRAK

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan.

**Kata kunci:** *pertanian, pembangunan, kebijakan, Indonesia, Thailand, India, Jepang*

### PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat

pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Kemtan, 2004; Kemtan, 2009; Saragih, 2010; Todaro dan Smith, 2014). Pembangunan pertanian masih menjadi upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi

pengangguran, menghilangkan malnutrisi, dan menghilangkan disparitas ekonomi antarwilayah (World Bank, 2009; Eicher and Staatz, 1998; Azra, 2006).

Guna merealisasikan peran strategis di atas, perlu dukungan kebijakan pertanian yang baik dan tepat (*good and right policies*) agar implementasinya yang ditujukan untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal dapat tercapai dengan efektif. Intinya adalah untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani (Kemtan, 2013; Tweeten, 1989; Deptan, 2002).

Dalam konteks global, pembangunan pertanian Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga seperti ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) dan Asia bahkan dunia (ASEAN Sekretariat, 2008; Plummer, 2009). Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain akan mempengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian Indonesia, demikian juga sebaliknya. Bahkan belakangan ini fenomena daya saing akibat kebijakan (*policy-induced competitiveness*) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (*right policy*) harus menjadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, analisis pembelajaran (*lessons learned*) pengalaman terbaik (*best practices*) dari negara-negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian beberapa negara terpilih (*selected countries*) yaitu Thailand, India, dan Jepang serta menyarikan implikasinya bagi Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan di atas, artikel ini disajikan dengan pendekatan kualitatif melalui deskripsi dan tabulasi data primer serta ulasan (*review*) referensi kebijakan pembangunan pertanian empat negara yaitu Thailand, India, Jepang, dan Indonesia. Pembahasan diawali dengan kerangka analisis kebijakan, tinjauan sekilas mengenai kinerja sektor pertanian masing-masing negara, pembahasan strategi

kunci kebijakan pembangunan pertanian setiap negara, petikan pelajaran (*lessons learned*) dari kebijakan pertanian negara-negara terpilih serta implikasinya bagi strategi kebijakan pertanian Indonesia, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Analisis Kebijakan

Kebijakan pertanian (*agricultural policies*) adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sektor pertanian (Ellis, 1998). Secara lebih spesifik kebijakan pertanian diartikan sebagai upaya pemerintah melalui berbagai instrumen dan peraturan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas pertanian (Pearson *et al.*, 2004; van Tongeren, 2008; Ragasa, 2011). Secara umum tujuannya adalah dalam rangka memajukan pertanian dan mengusahakannya agar lebih produktif sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan (regulasi dan/atau deregulasi) yang pada intinya diimplementasikan untuk kemudahan tataran operasional pembangunan pertanian di lapangan. Dalam konteks kenegaraan, sudah barang tentu peraturan tersebut disusun sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan tujuan menurut spesifikasi dan karakteristik masing-masing negara. Oleh karena itu, pengalaman terbaik (*best practices*) dari beberapa negara terpilih (*selected countries*) lain seyogianya dapat dijadikan petikan pelajaran (*lessons learned*) dengan improvisasi penyesuaian menurut spesifikasi dan karakteristik Indonesia.

Sebagaimana telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 (Kemtan, 2009), visi pembangunan pertanian Indonesia adalah: "terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani". Adapun sasarannya adalah: (1) mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal; (2) meningkatkan dan memantapkan swasembada

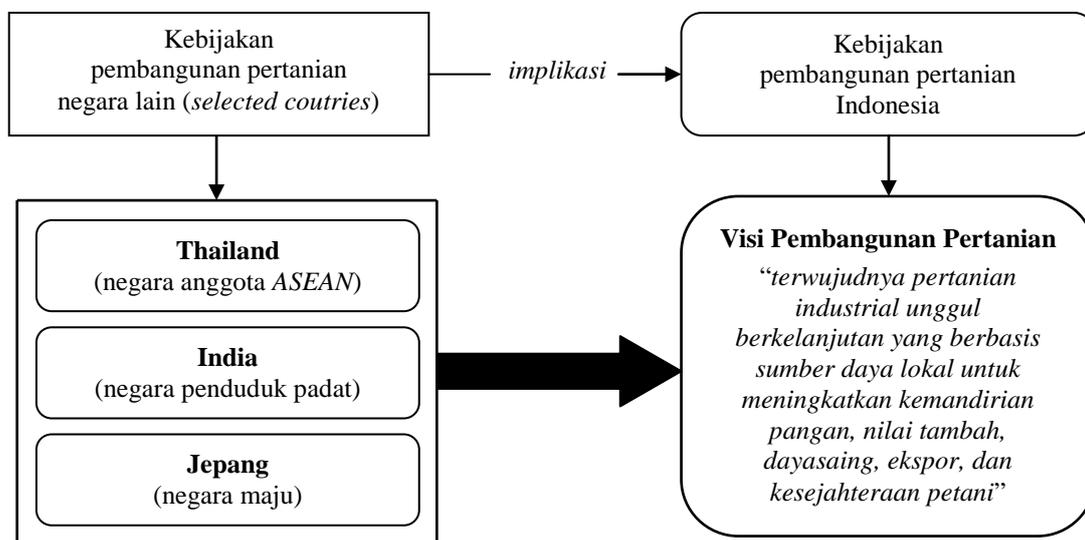
berkelanjutan, (3) menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, (4) meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian; dan (5) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kendati justifikasi dari visi dan tujuan rencana strategis kebijakan di atas sudah dirancang secermat mungkin, kebijakan beberapa negara lain dapat dijadikan sebagai acuan khususnya yang relevan dengan visi pembangunan pertanian Indonesia (ASEAN Secretariat, 2008). Negara-negara yang dimaksud meliputi Thailand, India, dan Jepang yang secara representatif masing-masing mewakili negara anggota ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Dengan kata lain, Thailand dan India dapat dianggap sebagai acuan dari sesama negara berkembang terkait dengan aspek eksistensi institusi dan demografi, sedangkan Jepang dijadikan referensi negara maju dalam hubungannya dengan unsur ekspektansi. Secara skematis kerangka kebijakan dalam artikel ini dapat diperhatikan pada Gambar 1.

dan tabulasi. Variabel kinerja yang dianalisis terdiri dari variabel makroekonomi dan sektoral (mikro).

Variabel makroekonomi yang dianalisis antara lain perkembangan produk domestik bruto pertanian dan nilai tambah, baik pertumbuhan maupun pangsa. Berikutnya variabel ketenagakerjaan yang meliputi pangsa dan produktivitasnya. Sementara itu, variabel sektoral yang dianalisis antara lain lahan dan produksi. Aspek lahan dideskripsikan dalam indikator persentase dan per kapita, sementara produksi dideskripsikan melalui indeks produksi dan komoditas utama serta ekspor utama. Beberapa kinerja dan kondisi spesifik masing-masing negara dideskripsikan secara terpisah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Seperti dijelaskan dalam kerangka pemikiran sebelumnya, memang Indonesia, India, dan Thailand dari sisi makroekonomi, yaitu variabel pangsa produk domestik bruto pertanian dan pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, mirip satu sama lain. Ketiga negara



Gambar 1. Kerangka Kebijakan Pembangunan Pertanian Negara Lain dan Implikasinya bagi Indonesia

### Perbandingan Kinerja Sektor Pertanian

Pada bagian ini disajikan perbandingan kinerja sektor pertanian negara-negara yang dianalisis yaitu Thailand, India, dan Jepang, serta Indonesia. Perbandingan kinerja sektor pertanian dianalisis untuk mendapatkan gambaran, kesamaan, dan perbedaan antarnegara. Perbandingan kinerja bersifat analisis deskriptif

tersebut masih bercirikan dan didominasi oleh sektor pertanian. Produk domestik bruto sektor pertanian masih memiliki pangsa yang relatif besar di ketiga negara yang bersangkutan, yaitu masing-masing sebesar 14,4 persen, 18,2 persen, dan 11,9 persen pada tahun 2013 (Tabel 1). Sebagai perbandingan, di Jepang (negara maju) produk domestik bruto pertaniannya hanya tinggal 1,1 persen.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Makroekonomi Pertanian India, Thailand, Jepang, dan Indonesia, 2013

Kinerja	India	Thailand	Jepang	Indonesia
1. Produk Domestik Bruto:				
a. Pertumbuhan (%)	4,71	1,36	0,32	3,540
b. Pangsa (%)	18,20	11,90	1,10	14,40
c. Nilai tambah per petani (USD/tahun)	672	1.136	46.045	981
2. Tenaga Kerja:				
a. Produktivitas (PDB pertanian/petani)	780	2.015	22.507	1.868
b. Pangsa (%)	49,70	41,33	3,84	38,58

Sumber: World Bank (2013) dan FAO (2014)

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, ketiga negara (India, Thailand, dan Indonesia) masih relatif sangat didominasi oleh sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian masih merupakan sumber pekerjaan dan pendapatan bagi lebih dari sepertiga tenaga kerja total. Bahkan di India, hampir separuh dari total tenaga kerjanya masih bekerja, berusaha, dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan di sektor pertanian, diikuti oleh Thailand yang 41,33 persen tenaga kerjanya bekerja di sektor pertanian. Indonesia sendiri memiliki pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sekitar 38,98 persen. Sementara itu, di Jepang yang sudah merupakan salah satu negara terkaya dan maju di dunia, tenaga kerja yang masih bekerja di sektor pertanian hanya tinggal 3,84 persen.

Dari sisi kinerja pertumbuhan produk domestik pertanian, pada tahun 2013 India menunjukkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,71 persen, diikuti oleh Indonesia dan Thailand masing-masing sebesar 3,54 persen dan 1,36 persen. Sementara itu, pertumbuhan produk domestik bruto pertanian di Jepang hanya 0,32 persen dari sisi nilai tambah yang mampu diperoleh tiap petani, serta memiliki hubungan terbalik dengan pertumbuhan dan pangsa produk domestik bruto pertanian. Jepang yang memiliki pangsa dan pertumbuhan produk domestik bruto pertanian terendah justru petani mampu memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tiga negara lainnya. Nilai tambah tersebut dapat dianggap sebagai proksi terdekat untuk pendapatan petani.

Sebagai salah satu negara maju di dunia, di Jepang rata-rata setiap petani memperoleh nilai tambah (pendapatan kotor) sekitar USD44.045 per tahun. Nilai tambah tersebut sangat jauh di atas nilai tambah yang didapatkan petani baik di India dan Thailand maupun Indonesia. Petani

Thailand hanya mampu memperoleh nilai tambah dari usaha dan kegiatan sektor pertanian sebesar USD1.136 per tahun. Berikutnya diikuti oleh petani Indonesia dan India masing-masing USD981 per tahun dan USD672 per tahun.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa posisi dan kondisi petani Jepang sebagai negara maju berbeda dengan India, Thailand, dan Indonesia dari sisi pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani pada ketiga negara lebih rendah dibandingkan di Jepang. Faktor mata uang asing sudah diisolasi (ditimbang) dengan perhitungan nilai konstan USD. Dengan demikian, walaupun pertumbuhan dan pangasanya relatif rendah, pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil dibandingkan dengan Thailand, India, dan Indonesia. Peningkatan pendapatan petani secara riil harus menjadi sasaran dan target utama bagi seluruh upaya pembangunan pertanian, di samping harus diikuti dengan peningkatan produksi dan harga riil komoditas pertanian. Peluang peningkatan pendapatan riil petani di Indonesia masih relatif terbuka luas untuk dapat mengejar ketertinggalannya dibandingkan Thailand dan Jepang.

Dari sisi sektoral yang lebih bersifat mikro, kinerjanya meliputi aspek lahan serta produksi pertanian serta pangan (Tabel 2). Dari sisi sektoral rata-rata lahan dan indeks produksi serta komoditas utama yang diproduksi dan diekspor, kinerja ketiga negara juga hampir mirip, kecuali Jepang. Rataan luas pengelolaan lahan pertanian di keempat negara berkisar antara 0,033 hektar hingga 0,25 hektar. Rataan luas pengelolaan tertinggi terdapat di Thailand yaitu sekitar 0,25 hektar per petani atau 1 hektar per rumah tangga pertanian dengan perkiraan jumlah anggota sekitar 4 orang per rumah tangga; kemudian diikuti oleh India yang memiliki rata-rata luas lahan pertanian per petani sekitar 0,12 hektar.

Indonesia sendiri memiliki rata-rata luas pengelolaan lahan pertanian kurang dari 0,096 hektar atau hanya sekitar 1.000 meter persegi per petani. Rataan pemilikan terendah adalah Jepang yang hanya 0,033 hektar per petani.

Kondisi di atas cukup kontradiktif mengingat secara pemahaman umum Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur, namun dalam kondisi riil banyak petani dan termasuk anggota rumah tangganya justru rata-rata luas lahannya cukup kecil (sempit). Kondisi dan fakta tersebut seyogianya harus menjadi dasar dan kerangka dalam setiap perencanaan dan implementasi suatu kebijakan pembangunan pertanian.

Secara umum proporsi lahan pertanian dibandingkan luas lahan suatu negara masih terbilang besar dan signifikan. India misalnya, luas lahan pertaniannya meliputi lebih dari 60,31 persen dari total luas lahannya. Thailand juga masih sangat dominan lahan pertaniannya, yaitu dengan pangsa sekitar 42,79 persen. Indonesia memiliki sekitar 31,19 persen lahan pertanian dari total luas lahannya. Sementara itu, Jepang

hanya memiliki luas lahan pertanian sekitar 12,47 persen dari total luas lahannya. Untuk India dan Indonesia, kecilnya rata-rata luas lahan pertanian karena banyaknya jumlah penduduk. Di Thailand dan Jepang, sempitnya rata-rata luas lahan lebih disebabkan oleh kecilnya luas wilayah masing-masing negara tersebut.

Selaras dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto pertanian seperti telah digambarkan pada bagian sebelum ini, tingkat pertumbuhan produksi agregat baik komoditas pertanian dan komoditas pangan juga menunjukkan pola yang identik. Tingkat pertumbuhan produksi agregat yang dimaksud diukur menggunakan indeks produksi FAO (2013), yaitu dengan cara membandingkan total tertimbang tingkat pertumbuhan produksi berbagai komoditas pertanian dan pangan dengan indeks rata-rata tahun 2004–2006. India, Thailand, dan Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan produksi agregat baik komoditas pertanian maupun pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang. Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi komoditas

Tabel 2. Perbandingan Kinerja Sektoral Pertanian India, Thailand, Jepang, dan Indonesia

Kinerja	India	Thailand	Jepang	Indonesia
1. Lahan:				
a. Dapat ditanami (%)	52,54	32,41	11,65	12,97
b. Pertanian (%)	60,31	42,79	12,47	31,19
c. Per petani (hektar)	0,12	0,25	0,033	0,096
2. Produksi:				
a. Indeks produksi pertanian (2004-2006=100)	132	124	102	132
b. Indeks produksi pangan (2004-2006=100)	133	125	102	133
3. Komoditas utama (rangking 2011):				
a. Produksi	Gula Beras Gandum Susu Kentang	Gula Beras Ubi kayu Jagung Karet	Beras Susu sapi Gula bit Sayuran Telur	Beras Sugar Minyak sawit Ubi kayu Kelapa
b. Ekspor	Kedelai Jagung Kapas Gula Gandum	Gula Ubi kayu Karet Nenas Buah segar	Gandum Produk makanan Produk minuman Bir Minyak kedelai	Minyak sawit Karet Kopra Molases Minyak nabati lain

Sumber: World Bank (2013) dan FAO Stat (2012)

pertanian dan pangan tahun 2012 dalam ukuran indeks mencapai 132–133 kecuali Thailand yang mencapai 124–125. Indeks produksi tersebut lebih tinggi dari Jepang yang hanya mencapai 102.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa produksi dan ekspor utama komoditas pertanian dan pangan antara India, Thailand, dan Indonesia juga hampir serupa. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan dan implementasi kebijakan pertanian, ketiga negara tersebut bersifat kompetitif. Dibandingkan dengan Jepang, produksi dan ekspor utama negara ini relatif berbeda. Indonesia merupakan produsen utama komoditas beras, gula, kelapa sawit, ubi kayu, dan kelapa. Indonesia juga merupakan pengekspor utama kelapa sawit, karet, kopra, molases, dan minyak nabati lainnya. Thailand adalah produsen utama gula, beras, ubi kayu, jagung, dan karet sekaligus sebagai negara pengekspor gula, ubi kayu, karet, nenas, dan buah segar. India merupakan produsen utama gula, beras, gandum, susu, dan kentang. Sementara itu, Jepang, di luar produsen utama beras, produksi dominan utamanya yaitu susu sapi, gula bit, sayuran, dan telur, sedangkan ekspor produk pangan dan pertanian olahannya adalah gandum, produk makanan, produk minuman, bir, dan minyak kedelai.

Deskripsi perbandingan dan analisis kinerja sektor pertanian di atas memberikan landasan dan pemahaman bahwa dari sisi makroekonomi dan sektoral serta rata-rata penguasaan sumber daya, negara-negara yang dianalisis relatif mirip yakni berada pada level yang relatif sama. Disadari bahwa beberapa variabel dan aspek lain yang juga berhubungan dengan pembangunan pertanian suatu negara belum tercakup dalam analisis ini. Tetapi, dengan gambaran dan pemahaman tersebut, aspek kebijakan pembangunan dapat ditempatkan lebih kontekstual dan relatif dapat dipandang sebagai salah satu variabel utama. Bukan berarti variabel dan aspek lain kurang penting dan kurang signifikan.

Untuk memberi penekanan dan konteks lebih dekat ke kondisi Indonesia, berikut digambarkan kinerja sektor pertanian nasional (Tabel 3). Sektor pertanian memiliki peran strategis di Indonesia (Wibawa, 2013; OECD, 2012), antara lain dalam: (1) penyediaan pangan penduduk (>230 juta jiwa); (2) penyediaan bahan baku untuk industri kecil dan menengah (87%); (3) penyumbang PDB (14,72%); (4) penghasil devisa dari ekspor (USD43,37 juta/tahun); (5) penyumbang tenaga kerja (33,32% dari total angkatan kerja nasional); (6) sumber pendapatan utama bagi sekitar 70 persen rumah tangga

Tabel 3. Kinerja Sektor Pertanian Indonesia

Kinerja	Keterangan
1. Produsen padi terbesar ketiga dunia (setelah Cina dan India)	Produksi 69,76 juta ton (tahun 2012)
2. Penghasil utama jagung di Asia	Produksi 19,37 juta ton (tahun 2012)
3. Produsen minyak kelapa sawit ( <i>crude palm oil/CPO</i> ) terbesar di dunia	Produksi 23,52 juta ton (tahun 2012)
4. Produsen karet terbesar kedua di dunia (setelah Thailand)	Indonesia menguasai 28 persen produksi karet dunia, sebagian besar dalam bentuk ekspor ban (69,8%) ke Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, Jerman, dan Kanada
5. Produsen kopi terbesar ketiga dunia (setelah Brazil dan Vietnam)	Produksi 0,63 juta ton (tahun 2011)
6. Produsen terbesar kedua pala di dunia (setelah Guatemala)	Negara-negara pengimpor utama pala adalah Amerika Serikat, Jerman Barat, Belanda, dan Inggris
7. Produsen lada terbesar kedua di dunia (setelah Viet Nam)	Produksi 88.160 ton (tahun 2012)

Sumber: Wibawa (2013) dan OECD (2012)

perdesaan; dan (7) pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 8 juta ton (Pemerintah RI, 2011).

### **Strategi Kunci Kebijakan Pembangunan Pertanian**

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan pertanian memiliki konteks dan prioritas serta spesifikasi unik sesuai dengan karakteristik dan target masing-masing negara. Di samping itu, strategi tersebut juga dilandasi oleh kondisi, tingkat ketersediaan sumber daya dan kapital, serta teknologi yang dimiliki. Dari berbagai variasi dan jenis kebijakan pembangunan pertanian, dalam analisis berikut dipilih dan dideskripsikan beberapa kebijakan utama, prioritas, dan spesifik sesuai konteks negara. Secara khusus, uraian berikut membahas strategi kunci kebijakan pertanian Thailand, India, Jepang, dan Indonesia.

#### ***Thailand***

Visi pembangunan pertanian Thailand adalah “petani mendapatkan standar hidup yang lebih baik, masyarakat memiliki ketahanan pangan, dan negara memperoleh penerimaan”. Sementara itu, sasarannya yaitu untuk: (1) peningkatan indeks kemakmuran petani hingga 80 persen pada tahun 2016; (2) peningkatan ekonomi sektor pertanian sebesar tiga persen per tahun; dan (3) pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk peningkatan produksi pertanian.

Strategi kunci kebijakan pertanian Thailand meliputi: (1) pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*); (2) pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan; dan (3) pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Strategi kunci dan sasaran utama kebijakan pertanian negara ini dapat diperhatikan pada Tabel 4.

Thailand merupakan salah satu negara pengeksportir beras terbesar dunia selain Viet Nam dan India. Beras merupakan salah satu komoditas pertanian utama dan unggulan Thailand. Beras juga menjadi salah satu prioritas utama pembangunan pertanian Thailand di samping komoditas lain seperti gula, jagung, sayuran, dan buah yang sudah menjadi produk global.

Kebijakan pembangunan pertanian kunci Thailand salah satunya terkait dengan

peningkatan harga beras (*rice pledging policy*). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Thailand berupaya menjamin agar petani beras mendapatkan harga riil yang relatif tinggi di tingkat panen dan penggilingan padi. Untuk itu pemerintah Thailand menyiapkan mekanisme pembelian langsung beras petani. Di samping itu, pemerintah Thailand juga melaksanakan kebijakan peningkatan harga ekspor beras. Pemerintah Thailand merasa memiliki daya tawar dan daya saing beras secara dominan di pasar global. Peningkatan harga ekspor beras tersebut ditransmisikan dan diteruskan ke harga petani dan pedagang.

Kebijakan peningkatan harga di atas diiringi dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas dan mutu beras, mulai dari tingkat petani/panen sampai ke tingkat eksportir/pasar dunia. Di samping itu, juga diimplementasikan kebijakan pendukung lain seperti fasilitas pupuk, benih, pengolahan, distribusi, pengemasan, dan pemasaran.

Untuk komoditas sayuran dan buah-buahan, pemerintah Thailand menargetkan produk sayur dan buah baik segar maupun olahan serta kemasan Thailand yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen di seluruh penjuru dunia. Pemerintah Thailand memiliki slogan “*kitchen of the world*” atau “dapur dunia”. Slogan tersebut mengandung pengertian bahwa Thailand berupaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengeksportir produk pertanian ke pasar dunia secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan konsumen global terhadap “kebutuhan dapurnya”, yaitu mulai beras, daging, telur, ikan, sayur, buah, bumbu, hingga penyedap dan produk lainnya.

#### ***India***

Sebagai negara dengan jumlah penduduk kedua terbesar di dunia (setelah Cina), India menghadapi dua tantangan utama terkait dengan pembangunan pertanian. *Pertama*, sektor pertanian melibatkan sekitar 58,2 persen penduduk negara ini dan menyangkut hampir 1,6 miliar penduduk. *Kedua*, India berhadapan dengan beberapa permasalahan yang antara lain meliputi penurunan sumber daya air, degradasi lahan, kerusakan kandungan tanah, penurunan produktivitas dan profitabilitas karena makin sempitnya luas penguasaan lahan, kekurangan

Tabel 4. Strategi Kunci dan Sasaran Kebijakan Pertanian Thailand

Strategi	Sasaran
1. Pengembangan kualitas hidup petani ( <i>smart farmer</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penerimaan dan stabilitas pertanian;</li> <li>b. Membangun basis pengetahuan bagi petani;</li> <li>c. Meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat untuk mengatasi bencana alam dan kesiapan akses terhadap komunitas ASEAN;</li> <li>d. Membangun ketahanan dan keamanan pangan bagi rumah tangga dan masyarakat petani;</li> <li>e. Mempromosikan dan mendukung para petani muda untuk sektor pertanian;</li> <li>f. Mengelola dan menyebarkan pengetahuan masyarakat; dan</li> <li>g. Mendukung kegiatan koperasi pertanian dan kelompok tani</li> </ul>
2. Pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan teknologi produksi dan menciptakan nilai tambah;</li> <li>b. Mempromosikan produksi pertanian hijau (<i>green agricultural production</i>);</li> <li>c. Menyeimbangkan dan menstabilkan tanaman pangan dan tanaman bahan energi (<i>fuel crops</i>);</li> <li>d. Mendukung pengembangan sistem pemasaran pertanian;</li> <li>e. Membangun konektivitas ekonomi regional dan internasional; dan</li> <li>f. Mempromosikan dan mengembangkan penelitian pertanian</li> </ul>
3. Pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempromosikan dan mengembangkan sumber daya dan infrastruktur pertanian yang efisien dan berkelanjutan;</li> <li>b. Mempromosikan dan mendukung petani untuk memanfaatkan sumber daya secara tepat dan berkelanjutan;</li> <li>c. Mendukung dan memperkuat partisipasi petani dalam pengelolaan pertanian;</li> <li>d. Melakukan persiapan untuk dampak perubahan iklim dan membentuk sistem peringatan dan mitigasi bencana alam; dan</li> <li>e. Mengembangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya pertanian</li> </ul>

Sumber: Karnjanakesorn (2013)

tenaga kerja pertanian, meningkatnya biaya dan ketidakpastian terkait dengan gejolak harga (*price volatility*) komoditas pertanian di pasar internasional.

Bertitik tolak dari tantangan di atas, secara garis besar strategi kunci kebijakan pembangunan pertanian India terdiri dari: (1) program Pelita (pembangunan lima tahun), (2) program *Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)*, (3) Misi Ketahanan Pangan Nasional (*National Food Security Mission/NFSM*), dan (4) Misi Hortikultura Nasional (*National Horticulture Mission/NHM*). Strategi kunci dan sasaran utama kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 5.

Kebijakan pembangunan pertanian utama dan kunci yang dilaksanakan oleh Pemerintah

dan Kementerian Pertanian India adalah kebijakan dukungan harga (*Agricultural Price Support Policies*) komoditas pertanian. Pemerintah India menetapkan suatu tingkat harga minimum subsidi untuk berbagai komoditas pertanian utama. Tingkat harga minimum subsidi tersebut direkomendasikan oleh Komisi Biaya dan Harga Pertanian. Di samping itu, berbagai pertimbangan dan rekomendasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap diperhitungkan oleh Komisi ini. Tingkat harga minimum merupakan jaminan harga minimum untuk petani pada saat menjual komoditasnya. Bila harga yang diterima oleh petani di atas harga minimum subsidi, maka petani dapat bebas menjual komoditas pertaniannya.

Tabel 5. Strategi Kunci dan Sasaran Kebijakan Pertanian India

Strategi	Sasaran
1. Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian secara inklusif;</li> <li>b. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan pertanian;</li> <li>c. Restrukturisasi institusi terutama dalam mengindari tumpang tindihnya program kegiatan;</li> <li>d. Peningkatan diseminasi teknologi tepat guna melalui perbaikan kualitas penelitian diiringi dengan peningkatan keterampilan;</li> <li>e. Peningkatan fungsi pasar dan efisiensi penggunaan sumber daya alam</li> <li>f. Peningkatan tata kelola penyediaan dan pelayanan kredit, input, dan kesehatan hewan; dan</li> <li>g. Pengembangan kapasitas kelompok usaha kecil, marjinal, dan wanita tani secara kolektif (bukan hanya tergantung pada subsidi semata).</li> </ul>
2. <i>Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan substansi tata kelola alokasi dana terkait dengan penerapan strategi, fleksibilitas, dan otonomi pembangunan pertanian; dan</li> <li>b. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>) untuk pembangunan pertanian terpadu.</li> </ul>
3. Misi Ketahanan Pangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi tanaman pangan biji-bijian (<i>food grains</i>);</li> <li>b. Peningkatan penyediaan benih hibrida untuk petani; dan</li> <li>c. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan penduduk.</li> </ul>
4. Misi Hortikultura Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran; dan</li> <li>b. Peningkatan penyediaan buah dan sayuran untuk konsumsi per kapita.</li> </ul>

Sumber: Kumar (2013)

Keterangan: <sup>\*1</sup> India saat ini sedang berada dalam tahap Pelita XI (2012-2017)

Dalam implementasinya, kebijakan dukungan tingkat harga minimum subsidi dilaksanakan oleh sebuah badan usaha milik negara India yang disebut *Food Corporation of India (FCI)*. Badan usaha milik negara tersebut mirip dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Indonesia, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dan signifikan lainnya. *FCI* India merupakan badan usaha milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah India melalui Kementerian Pangan dan Kementerian Pertanian yang dibentuk pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Pangan India (*Indian Food Corporation Act*).

Secara operasional, *FCI* ditugaskan untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan pangan nasional. *Pertama*, melaksanakan operasi dukungan harga efektif untuk melindungi kepentingan petani. *Kedua*, melaksanakan distribusi pangan utama berbasis biji-bijian ke seluruh negeri untuk mewujudkan sistem distribusi publik. *Ketiga*, mempertahankan tingkat yang aman dan memuaskan dalam level operasional dan cadangan penyangga dari

komoditas pangan utama untuk dapat menjamin ketahanan pangan nasional India.

*FCI* termasuk salah satu perusahaan terbesar di India dan Asia Selatan dalam bidang industri pangan. Perusahaan milik negara tersebut menjalankan usaha dan bisnis secara terintegrasi mulai dari pengadaan, penyimpanan dan kontrak, pengelolaan stok, distribusi, penjualan, pembiayaan, pengendalian mutu, permesinan, hingga usaha ekspor-impor. Perusahaan melakukan pembelian dan pengadaan untuk gandum sebesar 15–20 persen dan beras sebesar 12–15 persen dari total produksi nasional setiap tahun. Nilai omzet yang dikelola perusahaan untuk kedua komoditas tersebut mencapai USD10 miliar dolar atau sekitar Rp100 triliun. Nilai omzet tersebut belum termasuk komoditas lain seperti gula, jagung, kedelai, dan biji-bijian lainnya. Di samping itu, perusahaan juga mengelola dana subsidi dengan nilai total sekitar Rp123,4 triliun setiap tahun. Menurut laporan keuangan 2008, perusahaan menguasai aset dengan total nilai sebesar Rp27,6 triliun.

Model dan kebijakan dukungan harga melalui *FCI* mirip dengan tugas Bulog untuk komoditas beras di Indonesia. Persamaannya yang cukup menonjol adalah terkait dengan mandat pembelian beras petani bila terjadi penurunan harga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), akan tetapi untuk aspek rincian lainnya, *FCI* dan BULOG sangat berbeda jauh. Sebagai contoh, dalam hal pembentukan, *FCI* khusus didirikan melalui suatu Undang-Undang sedangkan BULOG tidak memiliki dasar Undang-Undang dalam pendiriannya. *FCI* berada di bawah kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pangan dan Kementerian Pertanian, sedangkan BULOG di bawah Kementerian BUMN. Demikian juga dalam aspek keuangan dan teknis operasional, *FCI* jauh lebih masif dan besar bila dibandingkan dengan BULOG.

### **Jepang**

Secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi: (1) pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan; (2) pengembangan budaya dan industri pangan; (3) aliansi strategis berbagai industri; (4) pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas; (5) pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian; (6) konsolidasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan (7) pengembangan infrastruktur lahan pertanian (peningkatan skala usaha). Sementara itu, program kebijakan baru pertanian Jepang tahun 2010 disajikan pada Tabel 6.

Salah satu implementasi kebijakan operasional kunci pemerintah Jepang dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (*direct payment for income support for farmers*). Kebijakan tersebut memberikan pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variabel kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran-permintaan Kementerian Pertanian Jepang. Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok/standar komoditas petani, sedangkan besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

Menurut Kementerian Pertanian Jepang, pembayaran langsung tersebut pada tahun 2011 mencakup 1,15 juta orang petani dengan nilai total sebesar 222,3 miliar yen atau sekitar Rp22 triliun. Nominal pembayaran tersebut relatif lebih besar bila dibandingkan dengan subsidi pangan Indonesia. Tetapi untuk Jepang, dibandingkan dengan anggaran kementerian, jumlah nominal tersebut masih terbilang kecil (hanya mencapai Rp190 triliun per tahun).

Kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran langsung untuk mendukung pendapatan petani pekebun di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan; perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada

Tabel 6. Program Kebijakan Pertanian Jepang, 2010

Kebijakan	Program
1. Transformasi kebijakan agraria (target 50% swasembada pangan dan mempertahankan multifungsi lahan)	a. Introduksi subsidi (pendapatan) rumah tangga petani; b. Pergeseran sistem produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen (kualitas, keamanan, dan stabilitas); dan c. Kerjasama industri (primer, sekunder, dan tersier) di perdesaan
2. Penciptaan lingkungan pertanian berkelanjutan melalui motivasi stabilisasi petani (subsidi pendapatan rumah tangga)	a. Pemberian standar subsidi (pendapatan) untuk mengatasi perbedaan biaya diiringi dengan dukungan manajemen; dan b. Antisipasi dalam mengatasi jatuhnya harga beras.
3. Perubahan orientasi kebijakan pertanian dari pola reduksi ke sistem produksi	a. Subsidi (pendapatan) bagi petani padi dan b. Subsidi (pendapatan) bagi pelaku pertanian secara adil untuk menjamin validasi kesesuaian penawaran dan permintaan serta menghindari segregasi pasar.

Sumber: Takabatake (2013)

perbedaan mutu jual (bukan beda harga seperti tanaman pangan). Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi seperti gandum, kedelai, gula bit, dan kentang. Dalam tahun anggaran 2012, Kementerian Pertanian Jepang telah mengalokasikan sekitar 212 juta yen atau sekitar Rp2,12 triliun.

### Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 (Kemtan, 2009), strategi kunci kebijakan pertanian Indonesia bertumpu pada “Tujuh Gema Revitalisasi” meliputi: (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana, (4) revitalisasi sumber daya manusia pertanian, (5) revitalisasi pembiayaan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Strategi kunci kebijakan tersebut berhubungan dengan tantangan yang dihadapi sektor pertanian Indonesia yang secara garis besar disajikan pada Tabel 7.

Untuk periode 2010 hingga 2014, Kementerian Pertanian mencanangkan empat target utama pembangunan pertanian Indonesia. Keempat target utama tersebut adalah: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi

pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Sasaran dari empat target utama tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 8.

### Petikan Pelajaran Kebijakan Pembangunan Pertanian bagi Indonesia

Melalui uraian pada bagian sebelumnya, tergambar dengan jelas bahwa faktor kebijakan pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan dan target sektor pertanian pada suatu negara. Walaupun dalam beberapa hal dan aspek tiap negara memiliki keunikan dan perbedaan, tetapi juga dapat diambil suatu kemiripan yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learned*) bagi negara lain seperti Indonesia. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, bagian ini menyajikan beberapa petikan pelajaran (*lessons learned*) dari negara Thailand, India, dan Jepang dan implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Dengan kata lain, petikan pelajaran tersebut disarikan dari kebijakan pembangunan pertanian pada ketiga negara sesuai dengan konteks Indonesia.

### Thailand

Thailand memprioritaskan pentingnya tiga strategi kebijakan pembangunan pertanian. Ketiga strategi kebijakan tersebut masing-masing

Tabel 7. Revitalisasi Pertanian Terkait dengan Tantangan Sektor Pertanian Indonesia

Revitalisasi	Tantangan
1. Lahan	a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; b. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian; dan c. Terbatasnya akses ke lahan pertanian kritis dan keputusasaan.
2. Perbenihan dan perbibitan	a. Lemahnya sistem produksi dan distribusi benih; dan b. Adanya hambatan pengembangan benih transgenik
3. Infrastruktur dan sarana	a. Kurang baiknya kondisi fasilitas jaringan irigasi; b. Tingginya biaya produksi dan transportasi.
4. Sumber daya manusia pertanian	a. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pertanian; dan b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian.
5. Pembiayaan petani	a. Terbatasnya akses petani ke lembaga keuangan; dan b. Tingginya suku bunga kredit untuk usaha pertanian.
6. Kelembagaan petani	a. Lemahnya organisasi dan kelembagaan petani.
7. Teknologi dan industri hilir	a. Masih diterapkannya teknologi dan peralatan tradisional; dan b. Belum berkembangnya usaha agroindustri.

Sumber: Wibawa (2013)

Tabel 8. Empat Target Utama dan Sasaran Pembangunan Pertanian Indonesia (2010-2014)

Target	Sasaran
1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	a. Swasembada berkelanjutan, di mana produksi kedelai (2,7 juta ton); produksi gula (4,81 juta ton); dan produksi daging sapi (0,55 juta ton) pada tahun 2014; dan b. Swasembada, di mana produksi padi dan jagung masing-masing 75,70 juta ton dan 29 juta ton pada tahun.
2. Peningkatan diversifikasi pangan	a. Skor pola pangan harapan mencapai 93,3 pada tahun 2014; dan b. Konsumsi pangan pokok beras menurun 3 persen per tahun.
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor	a. Industri hilir berbasis komoditas beras, tepung lokal ( <i>modified cassava flour/Mocaf</i> , sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan nonfermentasi, dan derivasi produk; dan b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi dan/atau deregulasi.
4. Peningkatan kesejahteraan petani	a. Pendapatan per kapita pertanian Rp7,93 juta pada tahun 2014; dan b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

Sumber: Kemtan (2009)

yaitu: (1) pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*); (2) efisiensi pengembangan produksi pertanian, ketatalaksanaan (*management*), dan ketahanan pangan; dan (3) pembangunan sumber daya pertanian yang efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Selanjutnya, beberapa aspek yang cukup menonjol dalam strategi kunci kebijakan pembangunan pertanian Thailand di antaranya: (1) peningkatan kapasitas petani (termasuk generasi muda) berbasis pengetahuan (*knowledge base*); (2) pengembangan penelitian, penyuluhan, koperasi, dan kelompok tani; (3) pengembangan infrastruktur, produksi, nilai tambah, dan pemasaran; dan (4) penguatan kerangka regulasi.

Dari strategi-strategi di atas, petikan pelajaran (*lessons learned*) dari Thailand meliputi tiga aspek pokok. *Pertama*, penanganan keamanan pangan (*food safety*) melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAPs)* dan *Good Handling Practices (GHPs)*. *Kedua*, proses pembinaan petani berbasis pengetahuan (*knowledge base*) baik teknologi maju (penyuluhan) maupun tradisional (*local wisdom*). *Ketiga*, prinsip kecukupan (*self-sufficiency*) dan kemandirian (*self-reliance*).

Selain kebijakan-kebijakan di atas, paling tidak ada dua kebijakan lainnya terkait dengan

pembangunan pertanian Thailand yang patut dijadikan petikan pelajaran bagi Indonesia. Kedua kebijakan tersebut adalah: (1) pemberian kartu kredit untuk petani dan (2) reformasi lahan pertanian dan hak atas tanah. Rincian dari kedua kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 9.

### India

India memiliki strategi kebijakan pembangunan pertanian yang secara garis besar meliputi peningkatan pertumbuhan, investasi publik, dan inisiatif khusus. Salah satu keberhasilan yang cukup menonjol pada pembangunan pertanian di India adalah terpenuhinya kebutuhan pangan domestik (bahkan ekspor) kendati negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah Cina.

Keberhasilan sektor pertanian India juga didukung oleh beberapa program seperti pemberdayaan perusahaan milik negara khususnya pangan dan logistik (*Food Corporation of India*), pengembangan infrastruktur (khususnya irigasi), sistem penyuluhan (*call center system*), dan fasilitasi kredit dengan bunga rendah. Program-program tersebut patut dijadikan petikan pelajaran (*lessons learned*) bagi Indonesia. Di samping itu, beberapa petikan pelajaran lainnya dari kebijakan

pertanian India adalah: (1) penggunaan bibit unggul hibrida, (2) penyediaan peralatan pertanian biaya murah, (3) pengembangan industri pengolahan makanan, (4) pembinaan petani secara 'helpline' (pemanfaatan informasi telekomunikasi), (5) penyediaan kredit lunak bagi petani, dan (6) pengembangan koperasi.

penganeekaragaman pendapatan, penelitian dan pengembangan (termasuk sektor swasta), akses pasar, dan *multifunctionality*.

Terkait dengan swasembada, kebijakan yang ditempuh Jepang adalah dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi,

Tabel 9. Kebijakan Kredit dan Lahan Pertanian di Thailand

Kebijakan	Keterangan
1. Pemberian kartu kredit untuk petani	<p>a. Sejak tahun 2012 pemerintah telah mengeluarkan 800 ribu unit kartu kredit untuk petani dengan tujuan agar petani; dapat memiliki modal untuk panen tanpa terjebak utang</p> <p>b. Kartu kredit dikeluarkan oleh <i>Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)</i> atau Bank BUMN Thailand;</p> <p>c. Tahun ini (2013) akan dikeluarkan dua juta unit kartu kredit; dan</p> <p>d. Pemberian kartu kredit diiringi dengan peluncuran "kartu identitas petani" untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran subsidi dan kebijakan.</p>
2. Reformasi lahan pertanian	<p>a. Sejak tahun 1975 melakukan reformasi lahan pertanian dengan memberikan peluang pada petani penggarap untuk memiliki tanah pertanian; dan</p> <p>b. Lahan pertanian diambil dari tanah negara, pengadaan tanah, dan tanah raja.</p>
3. Hak atas tanah	<p>a. Seperempat lahan pertanian adalah lahan reformasi pertanian yang ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian;</p> <p>b. Sertifikat hak pakai (<i>Sor-Por-Kor 4-01</i>) hanya untuk kegiatan pertanian;</p> <p>c. Sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan kecuali ke ahli waris (yang tetap menjadi petani);</p> <p>d. Bila tidak ada ahli waris yang menjadi petani, sertifikat kembali ke Kementerian Pertanian untuk didistribusikan kepada petani yang membutuhkan; dan</p> <p>e. Sampai dengan Agustus 2012, sekitar 5,5 juta hektar lahan telah didistribusikan kepada 2,5 juta rumah tangga tani.</p>

Sumber: Rauf (2013)

### Jepang

Jepang mengarahkan transformasi kebijakan pertanian kepada: (1) target pencapaian swasembada pangan sebesar 50 persen (atas dasar jumlah konsumsi kalori) pada tahun 2020 dan menjaga multi fungsi (*multifunctionality*) pertanian; (2) stabilisasi lingkungan pertanian guna memotivasi petani; dan (3) peningkatan produksi melalui subsidi. Peran menonjol dari kebijakan pertanian Jepang antara lain dalam hal menjaga keseimbangan antara produksi dan perdagangan, menciptakan nilai tambah melalui kerjasama sektor primer, sekunder, dan tersier (*6<sup>th</sup> industry*), manajemen risiko,

impor, dan cadangan pangan. Khusus untuk "*6<sup>th</sup> industry*", terminologi tersebut berasal dari multiplikasi antara sektor primer (*1<sup>th</sup> industry*), sektor sekunder (*2<sup>nd</sup> industry*), dan sektor tersier (*3<sup>rd</sup> industry*) menjadi sinergi industri yang dapat menciptakan nilai tambah dalam revitalisasi pertanian dan perdesaan serta perbaikan pendapatan petani. Sementara itu, kebijakan *multifunctionality* di Jepang ditujukan dalam rangka menciptakan jasa lingkungan (*environmental services*) lahan pertanian sebagai objek rekreasi dengan udara yang bersih, pengendalian banjir dan erosi serta cadangan air, dan menjaga eksistensi harmonisasi masyarakat perdesaan.

Terdapat beberapa kebijakan pertanian Jepang yang dapat dijadikan petikan pelajaran (*lessons learned*) bagi Indonesia. *Pertama*, memperhatikan keseimbangan antara industrialisasi dengan pembangunan pertanian. *Kedua*, menjaga sumber daya pertanian khususnya lahan pertanian potensial dan generasi muda pertanian. *Ketiga*, menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai kebutuhan dalam pembangunan pertanian. *Keempat*, mengupayakan agar pertanian menjadi sektor yang lebih menarik (*more attractive*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian bagi suatu negara. Ketiga negara yang diulas (*review*) memberi prioritas dan perhatian serius dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pertanian yang mampu melindungi pasar domestik, meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan riil petani melalui dukungan kebijakan dan subsidi serta penerapan teknologi dan inovasi. Untuk itu Indonesia juga harus mengantisipasi dan mengatasi (*countervailing*) dampak-dampak kebijakan tersebut. Beberapa upaya strategis yang mendesak untuk diimplementasikan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan pemberdayaan serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian.

### Saran

Berbagai implementasi terbaik dari kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan di tiga negara membawa implikasi yang besar dan luas bagi pembangunan pertanian Indonesia. Ketiga negara menargetkan dan mengimplementasikan kebijakan swasembada pangan untuk komoditas strategis seraya mempromosikan produk unggulan ekspor. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia, kendati jenis dan pilihan komoditasnya agak berbeda. Implikasinya antara lain peningkatan persaingan regional dan persaingan antarnegara untuk

komoditas pertanian terutama komoditas pangan. Indonesia harus memproteksi pasar domestik untuk produk beras dan gula dari Thailand, tetapi mempromosikan dan memperbesar penetrasi pasar ke Thailand dan India untuk produk minyak kelapa sawit, kakao, dan karet, serta karet dan hortikultura ke Jepang.

Beberapa kebijakan lain yang berdampak ke Indonesia di antaranya terkait dengan peningkatan produksi yang lebih efisien dan efektif melalui praktek pertanian yang baik (*good agricultural practices/GAPs*) dalam rangka menghadapi isu dan tantangan global seperti gejolak harga (*price volatility*) pangan, pertumbuhan penduduk (urbanisasi dan perubahan pola konsumsi), perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya lahan dan air. Perluasan dan pengelolaan sumber daya alam perlu dilaksanakan secara tepat dan optimal misalnya melalui konservasi lahan, penurunan emisi karbon, mitigasi perubahan iklim, dan pengawasan konversi (konsolidasi) lahan. Diperlukan dukungan promosi sistem pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge system*) melalui penelitian dan pengembangan dengan melibatkan pihak swasta.

Pokok-pokok kebijakan di atas seyogianya perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan Indonesia khususnya terkait dengan beberapa hal seperti bentangan geografis yang luas, sosial masyarakat yang majemuk, keragaman pertumbuhan wilayah, dan keterbatasan aksesibilitas. Implementasinya memerlukan koordinasi dan kerja sama semua pihak sesuai kebutuhan spesifik wilayah dan jenis usaha pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai (*value chain*), bioekonomi (*bio-economics*), dan termasuk di dalamnya pilihan antara swasembada dan ketahanan pangan (*self-sufficiency or food security*).

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. 2008. ASEAN Economic Community Blueprint. ASEAN Secretariat. Jakarta.
- Azra, A. 2006. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Deptan. 2002. Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Departemen Pertanian. Jakarta.

- Eicher, C.K. and J.M. Staatz. 1998. *International Agricultural Development*. The John Hopkins University Press. London.
- Ellis, F. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. Melbourne.
- FAO Stat. 2012. *FAO Statistical Year Book. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division*. Rome, Italy.
- FAO. 2014. *FAO Country Profile. Selected Countries*. <http://www.fao.org/country>. (1 Juli 2014).
- Karnjanakesorn, C. 2013. *Agriculture Development Policy in Thailand*. Paper presented at the workshop on "Best Practices of Agricultural Development Policy in Selected Countries and Implication for Indonesia" in Yogyakarta, 18-19 Juni 2013. Royal Thai Embassy in Indonesia. Jakarta.
- Kemtan. 2013. *Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045*. Biro Perencanaan. Jakarta
- Kemtan. 2004. *Rencana Strategis Departemen Pertanian Tahun 2005-2009*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kemtan. 2009. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kumar, T. 2013. *Agriculture Development Policy in India*. Paper presented at the workshop on "Best Practices of Agricultural Development Policy in Selected Countries and Implication for Indonesia" in Yogyakarta, 18-19 Juni 2013. The Embassy of Republic of India in Indonesia. Jakarta.
- OECD. 2012. *Indonesian Agricultural Policy Review. Kerjasama Organization for Economic Cooperation and Development dengan Kementerian Pertanian Indonesia*. Paris.
- Pearson, S., C. Gotsh and S. Bahri. 2004. *Application of Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture*. DAI-FSPA-Yayasan Obor. Jakarta
- Pemerintah RI. 2011. *Peraturan Presiden (Perpres) Indonesia No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Plummer, M.G. and C.S. Yue. 2009. *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment*. ASEAN Secretariat. ISEAS Publishing. Singapore.
- Ragasa, C., S.C. Babu and J. Ulimwengu. 2011. *Institutional and Capacity Challenges in Agricultural Policy Process*. IFPRI. Melbourne.
- Rauf, L. 2013. *Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) 2015: Tantangan dan Peluang*. Studi Kasus Thailand. Makalah disampaikan pada Workshop Nasional Kesiapan Sektor Pertanian menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Kedutaan Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand. Bangkok.
- Saragih, B. 2010. *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. IPB Press. Bogor.
- Takabatake, K. 2013. *Agriculture Development Policy in Japan*. Paper presented at the Workshop on Best Practices of Agricultural Development Policy in Selected Countries and Implication for Indonesia, Yogyakarta, 18-19 June 2013. The Embassy of Japan in Indonesia. Jakarta.
- Todaro, M.P. and S.C. Smith. 2014. *Economic Development*. Pearson Education Press. New York.
- Tweeten, L. 1989. *Agricultural Policy Analysis Tools for Economic Development*. University of Michigan Press. Michigan.
- Van Tongeren, F. 2008. *Agricultural Policy Design and Implementation: A Synthesis*. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper No. 7. OECD Publishing. Paris.
- Wibawa, W.D. 2013. *Agriculture Development Policy in Indonesia: the Strategic Plan of Agricultural Development 2010-2014*. Paper presented at the Workshop on Best Practices of Agricultural Development Policy in Selected Countries and Implication for Indonesia, Yogyakarta, 18-19 June 2013. Director of Planning Bureau, Ministry of Agriculture. Jakarta.
- World Bank. 2009. *World Development Report: Agricultural for Development*. World Bank. Washington.
- World Bank. 2013. *World Bank Database*. <http://www.worldbank.org/data/catalog/>. (2 Juni 2014).